SKRIPSI

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA

(Studi Kasus Di Desa Lido Kecamatan Belo Kabupaten Bima)

IMPLEMENTATION OF VILLAGE FUND ALLOCATION POLICIES

(Case Study in the Village Government of Lido Sub-district Belo)

Oleh :

UNJIRIN

216110116P

JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK KEBIJAKAN PUBLIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK (FISIPOL)

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

2020

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA
(Studi Kasus Di Desa Lido Kecamatan Belo Kabupaten Bima)

IMPLEMENTATION OF VILLAGE FUND ALLOCATION POLICIES
(Case Study in the Village Government of Lido Sub-district Belo)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian Guna Memperoleh Sarjana
Pada Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Mataram

JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK KEBIJAKAN PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK (FISIPOL)
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
2020

HALAMAN PERSETUJUAN

Proposal ini telah disetujui untuk diseminarkan pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 13 Feb 2019

Menyetujui:

Pembimbing I	Pembimbing II
(Dr. H. Muhammad Ali, M. Si.)	**(Dedy Iswanto,M.M)**
NIDN. 0806066801	

Mengetahui:
Program Studi Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Mataram
Ketua Program Studi

(Rahmad Hidayat. S.AP., M.AP.)
NIDN. 0822098901

PENGESAHAN SKRIPSI

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA STUDI KASUS DI DESA LIDO KECAMATAN BELO KABUPATEN BIMA

Oleh:

U N J I R I N
216110116P

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah satu Syarat ujian Guna Memperoleh Sarjana Pada Jurusan Publik Telah disetujui Oleh Tim Penguji Pada Tanggal Tertera Di Bawah ini:

Mataram, 19 Maret 2020

Tim penguji:

1. **Dr. H. Muhammad Ali, M.Si**
   NIDN. 0806066801
   Ketua

2. **Dedy Iswanto, ST., M.M**
   NIDN. 0818087901
   Anggota

3. **Drs. Mintasrihardi, M.H**
   NIDN. 0830016101
   Anggota

Mengetahui
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Dekan

Dr. H. Muhammad Ali, M.Si
NIDN. 0806066801

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN
Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat
Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906
Website : http://www.lib.ummat.ac.id E-mail : upt.perpusummat@gmail.com

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : UNJIRU
NIM : 216110116P
Tempat/Tgl Lahir : UDO, 16-12-1993
Program Studi : Administrasi Publik
Fakultas : Fisipol
No. Hp/Email : 085 238 816 121 /
Jenis Penelitian : ☑ Skripsi ☐ KTI ☐ .....

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama ***tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta*** atas karya ilmiah saya berjudul:

Implementasi kebijakan alokasi dana desa Study kasus di pemerintah desa UDO kecamatan belo kabupaten bima.

Segala tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Dibuat di : Mataram
Pada tanggal : .....

Penulis

METERAI TEMPEL 6CFEAHF338936812 6000 ENAM RIBU RUPIAH

NIM. 216110116P

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos.,M.A.
NIDN. 0802048904

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini Saya Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Mataram menyatakan bahwa:

Nama : Unjirin

Nim : 216110116P

Alamat : Desa Lido

Memang benar Skripsi yang berjudul Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa adalah hasil karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik di tempat manapun.

Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian Saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pemimbing. Jika terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah dibuplikasikan, memang diacu sebagai sumber dan dicantumkan dalam daftar pustaka. Jika dikemudian hari pernyataan Saya terbukti tidak benar Saya siap mempertanggungjawabkannya, termasuk bersedia meninggalkan gelar sarjana yang akan Saya peroleh.

Demikian surat pernyataan ini Saya buat dengan sadar dan tanpa tekanan dari pihak manapun.

Ma[illegible]2020

Unjirin

216110116P

MOTTO

"Bismillahirrahmanirrahim"

"Barangsiapa yang menghendaki duniawajib atasnya dengan ilmu, barang siapa mengehendaki akhirat maka wajib atasnya dengan ilmu dan barang siapa yang menghendaki kedua-duanya maka wajib atasnya dengan ilmu"

(H. R Bukhari)

PERSEMBAHAN

Sujud syukur kupersembahkan pada Allah SWT, Yang Maha Kuasa, berkat dan rahamat yang diberikan-Nya hinga saat ini saya dapat mempersembahkan skripsi ini kepada orang-orang tersayang:

1. Kedua orang tua saya Ibu Sukarti dan (Alm) Ayah Mahdin yang tercinta kakak – kakaku yang selalu memberikan memotivasi dan dukungan atas biaya dalam menempuh pendidikan Program Sarjana (S1) Universitas Muhammadiyah Mataram
2. Teman yang selalu memberi support dan motivasi serta do'a atas penyelesaian skripsi ini;
3. Kepada Adik dan kakak saya Fujirat serta kakaku Nurkhairah yang selalu memberi motivasi dan dukungan materil, membantu dan mensupport saya selama penyelesaian penyusun skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahhirobil alamin, segala puji dan syukur penulis haturkan kehadirat Ilahi Robbi, karna dengan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya semata yang mampu menghantarkan penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa setiap hal yang tertuang dalam skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan materi,moril dan spiritual dari banyak pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Ali, MSi Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram sekaligus dosen pemimbing satu
2. Bapak Dedy Iswanto, ST., M.M selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram sekaligus dosen pemimbing kedua
3. Bapak Rahmat Hidayat ., SAP., M.AP selaku Kepala Prodi Administrasi publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram
4. Seluruh Dosen falkutas Fisipol yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan pada penulis selama melaksanakan kuliah.
5. Seluruh Staff Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang sudah membantu selama kuliah.
6. Semua yang sudah membantu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu terimakasi atas semuanya

Penulis menyadari masih banyak ke kurangan dan kelemah yang ada pada tulisan ini. Oleh karena kritik dan saran dan penyempurnaan sangat penulis harapkan.

Mataram,13 Januari 2020

Penulis

UNJIRIN

NIM.21610116P

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**

HALAMAN PERSETUJUAN ..... **ii**

PENGESAHAN SKRIPSI ..... **iii**

PERNYATAAN ..... **iv**

MOTTO ..... **v**

PERSEMBAHAN ..... **vi**

KATA PENGANTAR ..... **vii**

DAFTAR ISI ..... **viii**

DAFTAR TABEL ..... **xii**

ABSTRAK ..... **xiii**

ABSTRACT ..... **xiv**

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Rumusan Masalah 7

1.3 Tujuan Penelitian 8

1.4 Manfaat Penelitian 8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu 9

2.2 Teori Implementasi Kebijakan 11

2.3 Konsep Alokasi Dana Desa 13

2.4 Faktor yang mempengaruhi Kebijakan Publik 14

2.5 Konsep Pelayanan Publik 15

2.6 Kualitas Pelayanan Publik.....18

2.7 Pemerintah Kabupaten 19

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian.....21

3.2 Fokus Penelitian.....22

3.3 Lokasi penelitian 23

3.4 Sumber Data.....23

3.5 Teknik Pengumpulan Data.....24

3.6 Teknik Pemilihan Informan 26

3.7 Instrumen Penelitiaan.....27

3.8 Teknik Analisis Data.....28

3.8.1 Reduksi Data. 29

3.8.2 Display data (penyajian data) 30

3.8.3 Menarik Kesimpulan 31

3.9 Teknik Keabsahan Data 31

3.9.1 Derajat Kepercayaan (*credibility*) 31

3.9.2 Triangulasi.....32

3.9.3 Kecukupan referensial.....32

3.9.4 Keteralihan (transferability) 32

3.9.5 Kebergantungan (dependability) 33

3.9.6 Kepastian (confirmability) 33

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 34

4.1.1 Profil Desa Lido Kecamatan Belo Kabupaten Bima.....34

4.1.2 Desa Lido 35

4.1.3 Agama 36

4.1.4 Tenaga Kerja 36

4.1.5 Kualitas Angkatan Kerja 37

4.1.6 Lembaga Pendidikan.....37

4.2 Implementasi Alokasi Dana Desa di Desa Lido Kecamatan Belo Kabupaten Bima..... 38

4.3 Tujuan dan bentuk Implementasi Alokasi Dana Desa di Desa Lido Kecamatan Belo Kabupaten Bima 40

4.4 Tugas dan Peran Pengelola Alokasi Dana Desa di Desa Lido Kecamatan Belo Kabupaten Bima 42

4.4.1 Tingkat Desa 42

4.4.2 Badan Permusyarawatan Desa 42

4.4.3 Sekretaris Desa.....43

4.5 Persyaratan Pencairan Alokasi Dana Desa di Desa Lido Kecamatan Belo Kabupaten Bima..... 44

4.6 Bentuk Implementasi Penggunaan Alokasi Dana Desa di Desa Lido Kecamatan Belo Kabupaten Bima 45

4.7 Sumber Daya Manusia Di Desa Lido Kecamatan Belo Kabupaten Bima 50

4.8 Ketercapaian Atas Tujuan Implementasi Dana Desa di Desa Lido Kecamatan Belo Kabupaten Bima 51
4.8.1 Visi kantor Desa Lido yaitu 51
4.8.2 Misi kantor Desa Lido yaitu 52
4.9 Faktor Penghambat Implementasi Dana Desa di Desa Lido Kecamatan Belo Kabupaten Bima 56
4.9.1 Sumberdaya Manusia 56
4.9.2 Sarana dan Prasarana.....58
4.9.3 Komunikasi 59
4.10 Hubungan struktur birokrasi dengan Implementasi Kebijakan.....61
4.11 Hubungan Lingkungan dengan Implementasi Kebijakan 61

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan 63
5.2 Saran.....63

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jurnal Penelitian Terdahulu 9

Tabel 4.2 komposisi penduduk Dan Jenis Pekerjaan Masyarakat 35

Tabel 4.4 Tenaga Kerja 36

Tabel 4.5 Kualitas Angkatan Kerja Masyarakat Desa Lido.....37

Table 4.6 Pendidikan Formal 38

Tabel 4.6 Rekapitulasi bentuk penggunaan Anggaran ADD Tahun 2018.....49

Tabel 4.7 Kerangka Dana Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2018 54

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA
(Studi Kasus Di Pemerintah Desa Lido Kabupaten Bima)

Oleh:
Unjirin[1], Muhammad Ali[2], Dedy Iswanto[3]

ABSTRAK

Adapun tujuan dari Alokasi Dana Desa (ADD) ini adalah untuk: 1) Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya 2) Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa. 3) Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa. 4) Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat desa. Studi implementasi kebijakan merupakan suatu kajian mengenai studi kebijakan yang mengarah pada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk implementasi penggunaan dana desa di Desa Lido Kecamatan Belo Kabupaten Bima. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan Deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, dokumentasi dan wawancara.

Hasil penelitian ditemukan bahwa implementasi penggunaan anggaran dana desa di Desa Lido Kecamatan Belo Kabupaten Bima memiliki anggaran dana desa sebesar Rp. 378.000.000 Dan menyerap anggaran tersebut sebesar Rp. 368.000.000 anggaran tersebut di gunakan untuk membangunan infrastruktur desa, kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa dan perjalanan Dinas Aparatur Desa Lido Kecamatan Belo Kabupaten Bima.

Kata Kunci: Implementasi, Dana Desa, Desa Lido, Kab. Bima

IMPLEMENTATION OF VILLAGE FUND ALLOCATION POLICY
(Case Study in Lido Village Government, Bima Regency)

Unjirin,
Muhammad Ali2, Dedy Iswanto3

ABSTRACT

The purpose of the Village Fund Allocation (ADD) is to: 1) Improve the administration of village government in carrying out government, development and community services according to their authority 2) Enhancing the capacity of village community institutions in planning, implementing and controlling participatory development in accordance with village potential. 3) Increase income distribution, employment opportunities and business opportunities for rural communities. 4) Encourage the enhancement of village community mutual cooperation. The study of policy implementation is a study of policy studies that lead to the process of implementing a policy.

This study aims to determine the form of implementation of user and village in Lido Village, Belo District, Bima. This study uses qualitative research methods with a descriptive approach. Data collection techniques using observation, documentation and interviews.

The results of the study found that the implementation of the use of the village and village in Lido Village, Belo district, the district of Banten had the district and village as large as Rp. 378,000,000 And absorb the aforementioned amount of Rp. 368,000,000 members are used for village infrastructure development, community empowerment activities, villages and trips in the village service sector in Lido village, Belo district, Bima.

Keywords: Implementation, Village Fund, Lido Village, Kab. Milky

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelayanan publik merupakan salah satu komponen penting dalam pelaksanaan pelayanan perizinan. Pelayanan Publik atau pelayanan umum yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah maupun Badan Usaha Milik Negara serta Swasta diharapkan dapat memberikan kepuasan bagi masyarakat secara menyeluruh dan mampu memberikan kenyamanan dan keamanan. Pemerintah sebagai public service harus mewujudkan tugas pelayanan tersebut dalam kinerja pemerintah daerah. Pada dasarnya manusia membutuhkan pelayanan, bahkan dapat dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia.

Masyarakat setiap waktu selalu menuntut pelayanan publik berkualitas dari pemerintah, meskipun tuntutan tersebut sering tidak sesuai dengan harapan karena secara empiris pelayanan publik yang terjadi selama ini masih berbelit-belit, lambat, mahal, dan melelahkan. Hal ini menimbulkan dampak buruk terhadap perkembangan kualitas pelayanan yakni sering terlantarnya upaya peningkatan pelayanan dan kurang berkembangnya inovasi dalam pelayanan serta kurang terpacunya pemerintah daerah untuk memperbaiki kualitas pelayanan.

Birokrasi merupakan sarana dan alat dalam penyelenggaraan pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah. Sebagai suatu sarana dan alat penguhubung antara masyarakat dan pemerintah, maka birokrasi memiliki peran strategis

yang menentukan apakah suatu pelayanan yang diberikan telah berkualitas atau belum. Namun sayangnya pengalaman sejarah telah menimbulkan beberpa masalah seperti sentralisasi kekuasaan dan pelayanan yang penuh dengan pungutan liar, maka dibentuklah suatu otonomi daerah.

Dalam menghadapinya, maka dibentuklah suatu otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan suatu upaya agar daerah mampu membangun wilayahnya secara lebih mandiri dan tidak lagi bergantung pada pemerintah pusat sehingga sentralisasi pemerintahan dapat dihindarkan. Oleh karena itu tanggung jawab serta kewenangan pemerintah daerah sangat besar dalam kaitannya dengan penyelenggaraan publik. Kewenangan tersebut semestinya dipergunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. (Pandji Santoso, 2008).

Salah satu kandungan dari otonomi yang sering menjadi sorotan adalah bagaimana mengolah sumber daya yang dimiliki sehingga mampu menopang kemandirian daerah tersebut dalam mencapai kesejahteraan masyarakatnya. Dari banyaknya sumber daya yang dimiliki suatu daerah, salah satu yang penting adalah terkait sumber daya modal.Sumber daya modal yang dimiliki suatu daerah adalah terkait nilai investasi yang ada pada daerah tersebut. Investasi merupakan salah satu komponen penting dalam pembangunan ekonomi karena akan terkait danberpengaruh pada kegiatan ekonomi yang akan datang.

Munculnya otonomi daerah menyebabkan terjadinya pergeseran paradigma dari sistem pemerintahan yang bercorak sentralisasi mengarah

kepada sistem pemerintahan yang desentralisasi, yaitu dengan memberikan keleluasaan kepada daerah dalam mewujudkan daerah otonom yang luas dan bertanggung jawab, untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai kondisi dan potensi wilayahnya.

Pemberian otonomi kepada daerah pada dasarnya bertujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah daerah, terutama dalam pelaksanakan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat serta untuk meningkatkan pembinaan kesatuan politik dan kesatuan bangsa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dinyatakan penatausahaan keuangan pemerintah desa terpisah dari keuangan pemerintah kabupaten.

Pemisahan dalam keuangan desa tersebut bukan hanya pada keinginan untuk melimpahkan kewenangan dan pembiayaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, tetapi yang lebih penting adalah keinginan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya keuangan dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Semangat desentralisasi, demokratisasi, transparansi dan akuntabilitas menjadi sangat dominan dalam mewarnai proses penyelenggaraan pemerintah pada umumnya dan proses pengelolaan keuangan desa khususnya.

Pengelolaan Alokasi Dana Desa selayaknya dapat mencerminkan komitmen pemerintah daerah untuk melaksanakan pemerintahan yangtidak mengorbankan kepentingan publik (public sphere). Hal ini akan mendorong

pemerintah daerah untuk benarbenar mengembangkan strategi pembangunan daerah berdasarkan potensi yang dimilikinya.

Sejalan dengan hal tersebut sudah barang tentu pelaksanaan pendistribusian kewenangan, pembiayaan dan penataan system pengelolaan keuangan tidak dapatdilihat dari seberapa besar desa akan memperoleh tetapi hal tersebut harus diimbangi dengan sejauh mana instrument atau sistem pengelolaan keuangan desa saat ini mampu memberikan nuansa manajemen keuangan yang lebih adil, rasional, transparan,partisipatif dan bertanggungjawab.

Secara khusus Peraturan Pemerintah nomor 43 Tahun 2014 bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa telah menetapkan landasan yang jelas dalam penataan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa antara lain memberikan keleluasaan dalam menetapkan produk pengaturan yang berkenaan dengan desa.

Pelanggaran terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa terkait pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa sudah sering terjadi di Indonesia, salahsatunya yaitu Berdasarkan hasil pemantauan Indonesia *Corruption Watch* (ICW) sejak tahun 2015 hingga Semester I 2018, kasus korupsi dana desa mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. "Tercatat sedikitnya sudah ada 181 kasus korupsi dana desa dengan

184 tersangka korupsi dan nilai kerugian sebesar Rp 40,6 miliar,". Sumber: (https://nasional.kompas.comdi akses 13 februari 2019).

Implikasi pada alokasi pembiayaan yang diberikan, di masa yang lalu selalu muncul persoalan-persoalan klasik mengenai penyelenggaraan pemerintah daerah dengan keuangan daerah. UU No 6 tahun 2014 menjelaskan bahwa tugas-tugas pembantuan tersebut disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumberdaya manusia dengan kata lain tidak ada mandat tanpa pendanaan *(no mandate without funding).* Dalam konteks ini dapat ditafsirkan bahwa negara tetap melakukan perannya memberikan fasilitasi kepada daerah untuk berkembang, tidak hanya menyerahkan kepada kemampuan/kapasitas daerah.

Di sisi lain, daerah diberi kewenangan yang seluasluasnya untuk melaksanakan pembangunan, dan dengan kewenangan itu maka daerah akan menggali sumber-sumber keuangan sebesar-besarnya sepanjang bersifat legal dan diterima masyarakat luas. Hal inipun berlaku juga dalam kaitannya hubungan pemerintah kabupaten dengan pemerintahan desa.

Adapun tujuan dari Alokasi Dana Desa (ADD) ini adalah untuk: 1) Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya 2) Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa. 3) Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat

desa. 4) Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat desa. Studi implementasi kebijakan merupakan suatu kajian mengenai studi kebijakan yang mengarah pada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan.

Dalam praktiknya, implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis dengan adanya intervensi berbagai kepentingan. Kamus Webster dalam Wahab (1997:86) mengartikan implementasi sebagai *"to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu*); to give practical effects to* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu)". Implementasi berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu kebijakan dan dapat menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu tertentu. (Agustino 2008: 158), implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan kurang.

Desa Lido adalah salah satu Desa yang ada di Kabupaten Bima yang menerima dana alokasi desa untuk pembangunan dan pengelolaan Sumberdaya manusia di Desa Lido. Keterbatasan Sumberdaya manusia menjadi salahsatu kendala yang dihadapi oleh pemerintah desa dalam mengelola dan menentukan program pembangunan dan pengelolaan dan desa oleh pemerintah Desa Lido. Sumber (Hasil Observasi peneliti, 2 Oktober 2018).

Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka dan pilihan langkah yang ada, dengan langsung mengimplementasikan dalam untuk program-program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari

kebijakan publik tersebut. Van meter dan Van Horn (Agustino 2008). Membatasi implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-indiividu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan terhadap tercapainya tujuan-tujuan telah digariskan dalam keputusaan kebijaksanaan.

Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan oprasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahanperubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan. Yang perlu ditekankan disini adalah bahwa tahap implementasi kebijakan tidak akan mulai sebelum tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran ditetapkan atau diidententifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan.

Dari berbagai permasalahan yang telah diuraikan di latar belakang menarik perhatian peneliti untuk melakukan penelitian terkait dengan "Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Di Pemerintah Desa Lido Kabupaten Bima).

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Di Pemerintah Desa Lido Kabupaten Bima)
2. Apa sajakah Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Di Pemerintah Desa Lido Kabupaten Bima?)

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Bagaimana Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Di Pemerintah Desa Lido Kabupaten Bima)
2. Untuk mengetahui Apa saja Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Di Pemerintah Desa Lido Kabupaten Bima)

1.4 Manfaat Penelitian

1. Hasil penelitian ini sebagai perasyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik (S.AP) di Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memberikan pengetahuan pada pembaca terkait Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Di Pemerintah Desa Lido Kabupaten Bima)
3. Hasil penelitian ini diharapakan dapat memberikan manfaat dan masukan bagi pemerintah terkait faktor penghambat Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Di Pemerintah Desa Lido Kabupaten Bima).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah salah satu acuan peneliti dalam melakukan penelitian sehingga peneliti dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu peneliti tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama persis seperti judul penelitian penulis. Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya kajian pada penelitian penulis. Berikut ini peneliti menyajikan beberapa penelitian terdahulu yang menjadi pedoman dan acuan penulis untuk penelitian skripsi berupa beberapa jurnal ilmu Administrasi Publik, yaitu:

Tabel 2.1 Jurnal Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Judul penelitian		Hasil	Perbedaan dan Persamaan
1.	Rasmah Hasman, (2015) Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Kinovaro Kabupaten Sigi.	Deskriptif Kualitatif	Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Kinovaro Kabupaten Sigi berjalan kurang baik. Karena, Dimensi Komunikasi dilihat dari aspek sosialisasi kebijakan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Kinovaro Kabupaten Sigi, kurang dilaksanakan oleh Kecamatan dan Desa. Dimensi sumber daya kurang memadai, baik dilihat dari sumber daya manusia maupun sarana prasarana. Dimensi disposisi	Persamaan terletak pada implementasi kebijakan alokasi dana desa, sedangkan Agustino, Leo. 2008. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.

			dalam hal ini komitmen pengelola maupun masyarakat dalam pelaksanaan ADD berjalan kurang baik, karena usulan tidak berbasis kebutuhan masyarakat.	
2.	Ayu Ningsi Slamet Dkkimplementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (Suatu Studi di Desa Kalasey Dua Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa) 2015	Deskriptif Kualitatif	Berdasarkan hasil penelitian melalui pengamatan, pengumpulan data dan proses wawancara yang peneliti lakukan mengenai Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Kalasey Dua Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa dapat menyimpulkan pada indikator isi kebijakan (konten kebijakan), bahwa ADD memang benar – benar untuk masyarakat.	Persamaan terletak pada alokasi dana desa, perbedaan terletak pada lokasi dan fokus penelitian.
3.	Samsul Baharam, (2017).Studi Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Dan Dana Desa Di Desa Bungi Kecamatan Kontunaga Kabupaten Muna	Deskriptif Kualitatif	Persepsi masyarakat terkait implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan di Desa Bungi Kecamatan Kontunaga Kabupaten Muna secara umum yaitu sudah baik.	Persamaan terletak pada alokasi dana desa, perbedaan terletak pada lokasi dan teori implementasi yang digunakan.
4.	Atika Wulan Ompi, (2016)Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa (Studi Di Desa Pangu Kec.Ratahan Kab.Minahasa Tenggara)	Deskriptif Kualitatif	Terdapat Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam upaya Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa di Desa Pangu yaitu Faktor Disposisi, Faktor Komunikasi, Faktor Sruktur Birokrasi dan dan Faktor Sumber Daya.	Persamaan terletak pada program palokasi dana desa desa, perbedaan terletak pada lokasi dan fokus penelitian.

Sumber Data: di unduh melalui https://media.neliti.com/media/publications/148742-ID-implementasi-kebijakan-alokasi-dana-desa.pdf

2.2 Teori Implementasi Kebijakan

Implementasi yang merupakan terjemahan dari kata "implementation", berasal dari kata kerja *"to implement"*. Menurut kamus *Webster* dalam Tachjan (2008:23), kata *to implement* berasal dari bahasa Latin "implementum" dari asal kata *"impere"* dan *"plere"*. Kata *"implere"* dimaksudkan *"to fill up"; "to fill in",* yang artinya mengisi penuh; melengkapi, sedangkan *"plere"* maksudnya *"to fill"* yaitu mengisi.

Selanjutnya kata *"to implement"* dimaksudkan sebagai :*" (1) to carry into effect; to fulfill; accomplish. (2) to provide with the means for carrying out into effect or fulfilling; to give practical effect to. (3) to provide or equip with implements" (Webster's Dictionary, dalam Tachjan, 2008:23).* Pertama, to implement dimaksudkan "membawa kesuatu hasil (akibat); melengkapi dan menyelesaikan". Kedua, *to implement* dimaksudkan "menyediakan sarana (alat) untuk melaksankan sesuatu; memberikan hasil yang bersifat praktis terhadap sesuatu".Ketiga *to implement* dimaksudkan menyediakan atau melengkapi dengan alat". Sementara itu kata publik merupakan kata untuk menjelaskan kebijakan yang dimaksud dapat dibedakan dari kebijakan/keputusan perorangan atau kelompok.

Implementasi kebijakan merupakan suatu hal yang krusial dalam studi kebijakan publik. Menurut George Edward III (dalam Santoso, 2012) bahwa

implementasi kebijakan adalah *"is the stage of policymaking between the establishment of a policy"*. ada 4 point penting, yaitu komunikasi, Sumberdaya, Disposisi dan struktur birokrasi. Pentingnya implementasi kebijakan dalam proses kebijakan ditegaskan oleh Udoji mengutip (2012) sebagai *"the execution of polices is imporant if not more important than policy making"*.

Implementasi kebijakan selalu menarik untuk dikaji, baik oleh pihak yang terlibat dalam proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan maupun pihak-pihak yang berada di luar kebijakan. Persoalan lain pada implementasi kebiajakan adalah apa yang dikatakan oleh Pressman dan Widavsky dalam Santoso Pandji, (2012) disebut sebagai "kompleksitas tindakan bersama". Griendle dalam (Syukami, 2000) mengatakan implementasi merupakan suatu proses dimana para pelaksana kebijakan melakukan aktivitas atau kegiatan sehingga pada akhirnya akan mendapatkan hasil sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan. Lester dan Stewart Jr dalam Badjuri dan Yuwono (2002), mengatakan bahwa implementasi sebagai suatu proses dan suatu hasil keberhasilan dari implementasi yang diukur dan dilihat dari proses dan pencapaian tujuan akhir, yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang diinginkan.

Dari beberapa pengertian dan definisi di atas terlihat bahwa implementasi merupakan suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan sehingga dapat mencapai hasil sebagaimana yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Implementasi kebijakan merupakan suatu proses di mana pelaksana kebijakan melakukan aktivitas

atau kegiatan sehingga pada akhirnya akan mendapatkan hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.

Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh "Grindle" (dalam Nugroho, 2014) bahwa pengukuran keberhasilan implementasi kebijakan dapat dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan program sesuai dengan yang telah ditentukan yaitu melihat pada action program dari individual projectes, dan yang kedua apakah tujuan program tersebut tercapai.

2.3 Konsep Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa atau ADD adalah bagian keuangan Desa yang diperoleh dari Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh kabupaten. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pada Pasal 18 bahwa Alokasi Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusatdan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10 %(sepuluh persen).

Keberadaan desa telah dikenal lama dalam tatanan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum Indonesia merdeka.Masyarakat di Indonesia secara turun temurun hidup dalam suatu kelompok masyarakat yang disebut dengan desa.

Desa secara etimologi berasal dari bahasa Sansekerta, decayang berarti tanah air, tanah asal atau tanah kelahiran.Dari perspektif geografis, desa atau

villagediartikan sebagai ‘a group of houses and shops in a country area, smaller than a town’.Desa atau udik, menurut definisi universal adalah sebuah aglomerasi permukiman di area perdesaan (rural).

Di Indonesia istilah desa adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah Distrik, yang dipimpin oleh Kepala Desa, sedangkan di Kutai Barat, Kalimantan Timur,disebut Kepala Kampung atau Petinggi. Konsep pembangunan Desa: Pembangunan desa merupakan seluruh kegiatan pembangunan yang berlangsung di pedesaan, meliputi seluruh aspek kehidupan dari seluruh masyarakat yang dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya gotong royong. Indikator keberhasilan pembanguna desa pada dasarnya adalah perbaikan rill dalam kondisi kehidupan masyarakat secara keseluruhan, karena pembangunan senantiasa merupakan proses perbaikan dari suatu keadaan ke keadaan yang lebih baik.

2.4 Faktor yang mempengaruhi Kebijakan Publik

Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan Menurut Hogwood dan Gunn (Wahab, 1997 : 71-81), untuk dapat mengimplementasikan kebijakan secara sempurna maka diperlukan beberapa persyaratan, antara lain: a.) kondisi eksternal yang dihadapi oleh Badan/Instansi pelaksana; b.) tersedia waktu dan sumber daya; c.) keterpaduan sumber daya yang diperlukan; d). implementasi didasarkan pada hubungan kausalitas yang handal; e.) hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubung; f.) hubungan ketergantungan harus dapat diminimalkan; g.) kesamaan persepsi dan kesepakatan terhadap

tujuan; h.) tugas-tugas diperinci dan diurutkan secara sistematis; i.) komunikasi dan koordinasi yang baik; j.) pihak-pihak yang berwenang dapat menuntut kepatuhan pihak lain.

Menurut Grindle (Wibawa, dkk., 1994) implementasi kebijakan ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Isi kebijakan berkaian dengan kepentingan yang dipengaruhi oleh kebijakan, jenis manfaat yang akan dihasilkan, derajat perubahan yang diinginkan, kedudukan pembuat kebijakan, siapa pelaksana program, dan sumber daya yang dikerahkan. Sementara konteks implementasi berkaitan dengan kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat, karakteristik lembaga dan penguasan dan kepatuhan serta daya tanggap pelaksana.

2.5 Konsep Pelayanan Publik

Menurut Sedermayanti (2000) mengatakan pelayanan berarti melayani suatu jasa yang dibutuhkan masyarakat dalm segala bidang kegiatan pelayanan kepada masyarakat merupakan salah satu tugas dari administrasi negara. Pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintahan mempunyai dampak yang luas bagi masyarakat baik dampak dari segi positif maupun negatif. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa pelayanan yang baik harus ditunjang dengan fasilitas yang memadai agar semua dapat berjalan dengan lancar. Lenvine dalam Dwiyanto (2006) pelayanan publik ada 3 indikator yaitu :

a. Responsivitas (Daya Tanggap), Kemampuan birokrasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas

pelayanan, dan mengembangkan programprogram pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan aspirasi masyarakat. Responsivitas menunjuk pada keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan dengan kebutuhan masyarakat dan aspirasi masyarakat. Responsivitas dimaksudkan sebagai salah satu indikator kinerja karena responsivitas secara langsung menggambarkan kemampuan birokrasi publik dalam menjalankan misi dan tujuannya, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Responsivitas yang rendah ditunjukan ketidakselarasan antara pelayanan dengan kebutuhan masyarakat. Hal tersebut jelas menunjukkan kegagalan organisasi dalam mewujudkan misi dan tujuan birokrasi publik. Organisasi yang memiliki responsivitas rendah dengan sendirinya memiliki kinerja yang jelek pula.

b. Responsibilitas, Responsibilitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa jauh proses pemberian layanan publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang telah ditetapkan dengan kebijakan birokrasi, baik yang eksplisit maupun implisit. Responsibilitas bisa saja pada suatu ketika berbenturan dengan responsivitas.

c. Akuntabilitas, Akuntabilitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar proses penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan kepentingan stakeholder dan norma-norma yang berkembang dimasyarakat. Kinerja birokrasi publik tidak hanya bisa dilihat dari

ukuran internal yang dikembangkan oleh birokrasi publik atau pemerintah seperti pencapaian target. Kinerja sebaiknya dilihat dari ukuran eksternal seperti nilai-nilai dan normanorma yang berlaku di masyarakat. Suatu kegiatan birokrasi memiliki akuntabilitas yang tinggi kalau kegiatan itu dianggap benar dan sesuai dengan nilainilai dan norma-norma yang berkembang dalam masyarakat.

Pengertian Pelayanan Publik Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik memberikan definisi ”Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.”Berdasarkan uraian pendapat ahli maka dapat disimpulkan pelayanan publik adalah segala kegiatan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan dalam hal ini adalah pemerintah untuk membantu, mengurus dan menyelesaikan kebutuhan setiap warga negara. Pemerintah sebagai penyedia pelayanan mengatur proses pemberian pelayanan yang baik sesuai dengan aturan pokok atau cara yang ditetapkan. Pelayanan yang diberikan pemerintah sebagai penyedia jasa pelayanan kepada masyarakat sangat ditentukan oleh kinerja pemberi pelayanan yang diberikan langusng kepada masyarakat.

2.6 Kualitas Pelayanan Publik

Kualitas Pelayanan Publik. Menurut Deddy Mulyadi, dkk (2016) untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, perlu diperhatikan komponen-komponen pelayanan, yang meliputi yakni,

1. prosedur pelayanan,
2. waktu penyelesaian,
3. biaya pelayanan,
4. produk pelayanan,
5. sarana dan prasarana,
6. kompetensi petugas pemberi pelayanan." Untuk lebih jelasnya akan diuraikan sebagai berikut :

a) Prosedur pelayanan, prosedur pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengaduan.

b) Waktu penyelesaian, ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan termasuk pengaduan.

c) Biaya pelayanan dalam hal ini biaya/tarif pelayanan termasuk rinciannya yang ditetapkan dalam proses pemberian layanan.

d) Produk layanan, hasil pelayanan yang akan diterima sesuai denganketentuan yang telah ditetapkan.

e) Sarana dan prasarana harus disediakan secara memadai oleh penyelenggara pelayanan publik.

f) Kompetensi petugas pemberi pelayanan, harus ditetapkan dengan tepat berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap dan perilaku yang dibutuhkan.

Dalam uraian diatas membuktikan merujuk pada peraturan Bupati Bima nomor 7 tahun 2017 tentang tata cara pengalokasian dan penyaluran alokasi dana desa di kabupaten bima tahun anggaran 2017, ditegaskan dalam ketentuan pasal 96 dan pasal 99 peraturan pemerintah Nomor 43 tahun 2014 sebagaiman telah diubah menjadi peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2015 tentang perubahan peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang – undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa.

2.7 Pemerintah Kabupaten

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang

pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Asas Otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah. Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi.

Berdasarkan prinsip Otonomi daerah maka kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota adalah:

a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota;
b. Urusan Pemerintahan yang penggunanya dalam Daerah kabupaten/kota;
c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah kabupaten/kota; dan/atau.
d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah kabupaten/kota.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini tergolong pada tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Moleong (2011) penelitian kualitatif bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya, perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll secara holistik, dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Dari uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan dalam kondisi objek alamiah, dimana antara individu dengan latar atau fokus penelitiannya tidak diisolasi kedalam bentuk variabel atau hipotesis, karena antara peneliti dengan tempat dimana dia melakukan penelitiannya merupakan satu kesatuan yang utuh. Selain itu, peneliti sendiri menjadi instrumen kunci dalam penelitiannya, karena penelitian itu sendiri bergantung pada pengamatan yang dilakukan peneliti dalam suatu kawasan tersendiri dan hanya peneliti yang mampu berinteraksi dengan orang-orang didalam kawasan tersebut, baik dalam bahasanya maupun didalam peristilahannya.

Pada metode penelitian deskriptif menurut Moleong (2011), data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Selain itu, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap

apa yang sudah diteliti. Laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberikan gambaran penyajian laporan tersebut. Data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, videotape, dokumen pribadi, catatan atau memo, dan dokumen resmi lainnya.

Dari uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif merupakan penelitian yang dilakukan untuk mengungkapkan data-data yang telah dihimpun yang berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka yang didapat dari fenomena lapangan yang bersifat empiris guna menggambarkan dan menafsirkan hasil penelitian. Demikian dengan pengumpulan data dan informasi melewati wawancara dengan masyrakat dan pemerintah desa setempat untuk informasi proses dan efektifitas alokasi dana desa lewat keterangan kepala desa sealu pimpinan pemerintahan desa, tokoh masyrakat dan pejabat sekretaris desa.

3.2 Fokus Penelitian

Topik atau fokus menurut Creswell (Dalam Tresiana, 2013) merupakan konsep utama yang dibahas dalam suatu penelitian ilmiah. Topik/ fokus itu dapat saja muncul dari tinjauan literatur, dianjurkan oleh rekan, peneliti atau dikembangkan melalui pengalaman nyata.

Moleong (2011) menjelaskan penetapan fokus ini berfungsi untuk memenuhi kriteria inklusi-eksklusi atau kriteria masuk-keluar suatu informasi yang baru diperoleh di lapangan. Dengan bimbingan dan arahan suatu fokus, seorang peneliti tahu persis data mana dan data tentang apa yang perlu dikumpulkan. Penelitian ini akan mengkaji mengenai hal-hal sebagai berikut:

a. Menganalisis Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Lido Kabupaten Bima.
b. Menganalisis faktor penghambat Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Lido Kabupaten Bima.

3.3 Lokasi penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian ini dilakukan agar peneliti dapat mengetahui bagaimana keadaan yang sebenarnya terhadap apa yang hendak diteliti. Dalam penelitian ini lokasi yang dipilih untuk penelitian adalah di Kantor Desa Lido Kecamatan Belo Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat.

3.4 Sumber Data

Menurut Lofland dan Lofland dalam Moleong (2011: 157) sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen, dan lain-lain. Sumber data merupakan suatu benda, hal, atau orang maupun tempat yang dijadikan sebagai acuan peneliti untuk mengumpulkan data yang diinginkan sesuai dengan masalah dan fokus penelitian. Jenis data yang akan dikumpulkan melalui penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder.

a. Data Primer Yaitu berupa kata-kata dan tindakan (informan) serta peristiwa-peristiwa tertentu yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, dan merupakan hasil pengumpulan peneliti sendiri selama berada di lokasi penelitian. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari responden penelitian, baik wawancara maupun

dokumentasi serta catatan lapangan peneliti yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Adapun data-data sekunder yang didapat peneliti adalah data-data dan dokumentasi yang ada hubungannya dengan Implementasi Alokasi Dana Desa Lido Kecamatan Belo Kabupaten Bima.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Lofland dalam Moleong (2011:157) mengatakan bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Berkaitan dengan hal ini, jenis data dibagi ke dalam kata-kata, tindakan, sumber data tertulis, foto, dan lainnya. Data adalah bahan keterangan dalam suatu objek penelitian yang diperoleh. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Menurut Stewart & Cash (2008) dalam Herdiansyah (2012: 118), wawancara diartikan sebagai sebuah interaksi yang didalamnya terdapat pertukaran atau berbagi aturan, tanggung jawab, perasaan, kepercayaan, motif, dan informasi. Wawancara bukanlah suatu kegiatan dengan kondisi satu orang melakukan/memulai pembicaraan sementara yang lain hanya mendengarkan. Hasil yang diharapkan dari wawancara dengan para informan adalah mendapatkan data yang akurat yang berkaitan erat dengan permasalahan dalam penelitian ini.

b. Dokumentasi

Menurut Herdiansyah (2012: 143), dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek.

Teknik dokumentasi dilakukan untuk melengkapi data yang tidak didapatkan dari proses wawancara. Data dalam penelitian kualitatif kebanyakan diperoleh dari sumber manusia atau human resources, melalui observasi dan wawancara. Akan tetapi ada pula sumber bukan manusia, non human resources, diantaranya dokumen berupa peraturan perundang-undangan, buku harian, laporan kegiatan, panduan pelaksanaan kegiatan, arsip-arsip, foto-foto, dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian. Data yang dikumpulkan dari dokumentasi merupakan data yang mendukung data sekunder dengan cara mengumpulkan data yang bersumber pada data-data tertulis, arsip maupun gambar.

c. Observasi

Menurut Cartwright & Cartwright (dalam Herdiansyah (2012), observasi adalah suatu proses melihat, mengamati, dan mencermati serta "merekam" perilaku secara sistematis untuk suatu tujuan tertentu. Adapun observasi yang dilakukan oleh peneliti ialah mengamati secara langsung.

3.6 Teknik Pemilihan Informan

Sanafiah Faisal (dalam Sugiyono 2009). Dengan mengutip pendapat Spradley mengemukakan bahwa, situasi sosial untuk sampel atau instrumen sangat disarankan suatu situasi sosial didalamnya menjadi semacam muara dari banyak domain lainnya. Selanjutnya dinyatakan bahwa, informan sebaiknya memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Mereka yang menguasai atau memahami sesuatu melalui proses enkulturasi, sehingga sesuatu itu bukan sekedar diketahui, tetapi juga dihayatinya.
2. Mereka yang tergolong masih sedang berkecimpung atau terlibat pada kegiatan yang tengah diteliti.
3. Mereka yang mempunyai waktu yang memadai untuk dimintai informasi.
4. Mereka yang tidak cenderung menyampaikan informasi hasil "kemasannya" sendiri.
5. Mereka yang pada mulanya tergolong 'cukup asing' dengan peneliti sehingga lebih menggairahkan untuk menjadi narasumber.

Dalam penelitian ini teknik pemilihan informan yang dipergunakan peneliti adalah purposive, untuk pemerintah karena sudah diketahui tugas pokok dan fungsi dalam Artinya pengambilan dengan sengaja untuk memperoleh key informan (informan kunci) yaitu orang-orang yang mengetahui dengan benar atau yang terpercaya, sedangkan untuk turun ke masyarakat peneliti menggunakan teknik snowball untuk pemilihan informan

karena peneliti belum mengetahui persis siapa yang menjadi informan kunci di lingkungan masyarakat.

Berdasarkan kriteria tersebut, informan dalam penelitian ini adalah:

1. Kepala Desa Lido Kecamatan Belo Kabupaten Bima
2. Sekretaris Desa Lido
3. Masyarakat

3.7 Instrumen Penelitiaan

Dalam Sugiyono (2015), yang menjadi Instrumen dalam penelitian kualitatif atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu peneliti sebagai instrumen juga harus "divalidasi" seberapa jauh Peneliti kualitatif siap melakukan penelitian yang selanjutnya terjun kelapangan,. Validasi terhadap instrument meliputi pemahaman metode penelitian kualitatif, penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti, kesiapan peneliti memasuki objek penelitian, baik secara akademik mupun logistiknya. Yang melakukan validasi adalah peneliti itu sendiri, melalui evaluasi diri sejauhmana pemahaman, penguasaan teori dan wawasan terhadap bidang yang diteliti, serta kesiapan memasuki lapangan penelitian.

Peneliti kualitatif sebagai human instrument (manusia sebagai instrument), berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumberdata, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya. Selanjutnya Nasution dalam Sugiyono (2009) menyatakan "dalam penelitian kualitatif, tidak ada pilihan lain dari pada menjadikan manusia sebagai

instrument penelitian utama. Alasannya ialah bahwa, segala sesuatunya belum mempunyai bentuk yang pasti. Masalah, fokus penelitian, prosedur penelitian, hipotesis yang digunakan bahkan hasil yang diharapkan, itu semua tidak dapat ditentukan secara pasti dan jelas sebelumnya. Segala sesuatu masih perlu dikembangkan selama penelitian itu. Dalam keadaan yang serba tidak pasti dan tidak jelas itu, tidak ada pilihan lain dan hanya peneliti itu sendiri sebagai satu-satunya yang dapat mencapainya".

3.8 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis data yang digunanakan melalui pendekatan kualitatif, yaitu menjawab dan memecahkan masalah dengan melakukan pemahaman dan pendalaman secara menyeluruh guna menghasilkan data yang akurat dari obyek yang diteliti kemudian di paparkan sesuai dengan kondisi dan waktu.Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan.

Dalam hal ini Nasution (dalam Sugiyono 2009) menyatakan "Analisis telah dimulai sejak merumuskan masalah dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan berlangsung secara terus menerus penulisan hasil penelitian".Analisis data dalam penelitian kualitatif selama dilapangan dengan model miles and Huberman (dalam Sugiyono 2015), dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang

diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data yang kredibel. Miles and huberman (dalam Sugiyono 2015), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data kualitatif yaitu:

3.8.1 Reduksi Data.

Data yang diperoleh dilapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, semakin lama peneliti kelapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit, untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, mengambil data pokok, mengorganisir data kasar yang diperoleh dari lapangan sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan. Dalam mereduksi data, setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah pada temuan. Oleh karena itu, kalau peneliti dalam melakukan penelitian menemukan segala sesuatu yang dipandang asing, tidak dikenal, belum memiliki pola, justru itulah yang harus di jadikan perhatian peneliti dalam melakukan reduksi data.

Reduksi data merupakan proses berpikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan dan kedalaman wawasan yang

tinggi. Bagi peneliti yang masih baru, dalam mereduksi data dapat didiskusikan pada teman atau orang lain yang di anggap ahli. Melalui diskusi itu, maka wawasan peneliti akan berkembang, sehingga dapat mereduksi data-data yang dimilki nilai temuan dan pengembangan teori yang signifikan. Mereduksi data dapat dilakukan dengan cara hasil catatan di lapangan yang banyak dan belum bermakna. Catatan lapangan berupa huruf besar dan kecil, angka dan simbol-simbol yang masih semrawut, yang tidak dapat dipahami. Dengan reduksi, maka peneliti merangkum, mengambil data pokok dan penting, membuat kategorisasi, berdasarkan huruf besar, huruf kecil, dan angka. Data yang tidak penting yang di ilustrasikan dalam bentuk simbol-simbol dan lain-lain dibuang, karena dianggap tidak penting.

3.8.2 Display data (penyajian data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data (Penyajian data), dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, flowchart dan sejenisnya. Miles and Huberman dalam Sugiyono (2015) menyatakan yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif. Penyajian data merupakan upaya penyusunan sekumpulan informasi kedalam suatu matrik atau konfigurasi yang mudah dipahami. Konfigurasi yang demikian ini akan memungkinkan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan penyajian data, maka

mempermudah untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang dipahami tersebut disarankan, selain teks naratif dalam penyajian data bisa menggunakan grafik, matrik, network (jaringan kerja) dan Chart.

3.8.3 Menarik Kesimpulan

Setelah pengumpulan data, Peneliti mulai mencari makna dari data-data yang telah terkumpul. Selanjutnya mencari arti dan penjelasannya kemudian menyusun pola-pola hubungan tertentu kedalam satu kesatuan informasi yang mudah dipahami dan ditafsirkan, daari data yang terkumpul kemudian dikategorikan sesuai dengan perincian masalahnya dan di bandingkan antara satu dengan lainnya sehingga mudah ditarik kesimpulan.

3.9 Teknik Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan standar validitas dari data yang diperoleh. Untuk menentukan keabsahan data dalam penelitian kualitatif harus memenuhi beberapa persyaratan. Menurut Moleong (2011) terdapat empat kriteria keabsahan data yaitu:

3.9.1 Derajat Kepercayaan (*credibility*)

Pada dasarnya derajat kepercayaan (kredibilitas) menggantikan konsevaliditas internal dari nonkualitatif. Kriteria ini berfungsi pertama, melaksanakan inkuiri sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan penemuannya dapat dicapai; kedua, mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian

oleh peneliti pada kenyataan ganda yang sedang diteliti. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh peneliti untuk memeriksa kredibilitas atau derajat kepercayaan antara lain:

3.9.2 Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Teknik triangulasi yang palingbanyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya. Denzin (dalam Moleong, 2011) membedakan empat macam triangulasi sebagaiteknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, teori. Dalam penelitian ini, peneliti ini melakukan pengecekan data melalui beberapa sumber lain dengan melakukan wawancara ke beberapa informan yakni pihak Pemerintah Desa Lido Kecamatan Belo. Selain itu peneliti melakukan triangulasi dengan membandingkan data yang diperoleh melalui sumber wawancara, observasi di lapangan, dan dokumentasi.

3.9.3 Kecukupan referensial

Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan berbagai bahan-bahan, catatan, atau rekaman-rekaman yang dapat digunakan sebagai referensi dan patokan untuk menguji sewaktu diadakan analisis dan penafsiran data.

3.9.4 Keteralihan (transferability)

Pengujian transferability atau keteralihan data berkenaan dengan hingga mana hasil penelitian ini dapat diterapkan atau digunakan

dalam situasi lain. Untuk melakukan keteralihan, peneliti berusaha mencari dan mengumpulkan data kejadian empiris dalam konteks yang sama yaitu pihak-pihak yang terlibat langsung dalam Implementasi Alokasi Dana Desa di Desa Lido Kecamatan Belo Kabupaten Bima.

3.9.5 Kebergantungan (dependability)

Kebergantungan merupakan substitusi reliabilitas dalam penelitian nonkualitatif. Reliabilitas merupakan syarat bagi validitas. Dalam penelitian kualitatif, uji kebergantungan dilakukan dengan pemeriksaan terhadap keseluruhan proses penelitian. Sering terjadi peneliti tidak melakukan pemeriksaan terhadap keseluruhan proses penelitian ke lapangan, tetapi bisa memberikan data. Peneliti ini perlu diuji dependability-nya, dan untuk mengecek apakah hasil penelitian ini benar atau tidak, maka peneliti mendiskusikannya dengan pembimbing. Pengujian dependability dalam penelitian ini dilakukan oleh pembimbing untuk mengaudit keseluruhan aktivitas peneliti dalam melakukan penelitian.

3.9.6 Kepastian (confirmability)

Menguji kepastian data *(confirmabilty)* berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang ada dalam penelitian, jangan sampai proses tidak ada tetapi hasilnya ada.